



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT  
**SUB UNIT KERJA** : INSPEKTORAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MASHAD
2. Jabatan : PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)
3. NHK : 423806

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 388.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/98 m2 di GROBOGAN,  
HASIL SENDIRI Rp. 388.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 167.500.000

1. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 1972, HASIL SENDIRI Rp.  
2.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MATIK Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.  
3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MATIK Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.  
5.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MATIK Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.  
7.000.000
5. MOTOR, HONDA MATIK Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.  
14.000.000
6. MOTOR, HONDA MATIK Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
16.000.000
7. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.  
120.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 38.497.105**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---



Sub Total	Rp.	593.997.105
III. HUTANG	Rp.	114.563.700
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	479.433.405

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.